

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengangguran merupakan masalah yang belum tuntas di Indonesia. Jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja menciptakan pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang.<sup>1</sup> Sebagian besar pengangguran-pengangguran tersebut adalah golongan yang terdidik yaitu orang yang telah tamat sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran terdidik itu meningkat dari 5,34 persen menjadi 6,22 persen dari jumlah total penduduk.<sup>2</sup> Kurangnya lapangan kerja yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap di dunia persaingan kerja.<sup>3</sup>

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 128,06 juta orang, naik 2,62 juta orang dibanding Agustus 2016 (setahun yang lalu). Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2017, sebanyak 121,02 juta orang penduduk bekerja dan sebanyak 7,04 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah

---

<sup>1</sup> Data Badan Pusat Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2017, No. 103/11/Th. Xx, 06 November 2017

<sup>2</sup> Tedjasuksmana Budianto, Potret Umkm Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya : Hal 193

<sup>3</sup> Ibid P.4

penduduk bekerja dan pengangguran masing-masing bertambah 2,61 juta orang dan 10 ribu orang. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2017 tercatat sebesar 66,67 persen, meningkat 0,33 poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2017, TPAK laki-laki sebesar 82,51 persen sementara TPAK perempuan hanya sebesar 50,89 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, baik TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,54 poin dan 0,12 poin.

Tabel I.1 Penduduk usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

Status Keadaan Ketenagakerjaan	1 Tahun Lalu	Semester Lalu	Saat Ini	Perubahan 1 Tahun		Perubahan 1 Semester	
	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017	(Ags 2016–Ags 2017)	(Ags 2016–Ags 2017)	(Feb 2017–Ags 2017)	(Feb 2017–Ags 2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Juta Orang			Juta Orang	Persen	Juta Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	189,10	190,59	192,08	2,98	1,58	1,49	0,78
Angkatan Kerja	125,44	131,55	128,06	2,62	2,09	-3,49	-2,65
Bekerja	118,41	124,54	121,02	2,61	2,20	-3,52	-2,83
Pengangguran	7,03	7,01	7,04	0,01	0,14	0,03	0,43
Bukan Angkatan Kerja	63,66	59,04	64,02	0,36	0,57	4,98	8,43
Sekolah	15,92	15,24	16,49	0,57	3,58	1,25	8,20
Mengurus Rumah Tangga	39,34	36,08	39,92	0,58	1,47	3,84	10,64
Lainnya	8,40	7,72	7,61	-0,79	-9,40	-0,11	-1,42
	Persen			Poin		Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,61	5,33	5,50			-0,11	0,17
Perkotaan	6,60	6,50	6,79			0,19	0,29
Perdesaan	4,51	4,00	4,01			-0,50	0,01
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,34	69,02	66,67			0,33	-2,35
Laki-Laki	81,97	83,05	82,51			0,54	-0,54
Perempuan	50,77	55,04	50,89			0,12	-4,15

Sumber : BPS tahun 2017

Tentu saja masalah pengangguran bila tidak di atasi akan terus bertambah seiring berjalannya perkembangan zaman. Masalah ini dapat di atasi dengan penyerapan tenaga kerja, tentu saja penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan sektor industri dan peningkatan modal. Modal dapat di peroleh melalui dana pribadi, tabungan, pinjaman, maupun investasi.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Tabel I.2

## Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Ekonomi

1) (juta US\$), 2012-2016 berdasarkan range dari data BPS di MS Excel

Sektor Ekonomi	Investasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan :	1	1	2	2	1
	677.60	655.50	326.20	219.20	759.50
Pertanian	1	1	2	2	1
	621.70	616.60	237.50	147.10	638.10
Kehutanan	26.90	28.80	53.30	19.00	78.20
Perikanan	29.00	10.00	35.30	53.10	43.30
2. Pertambangan dan Penggalian	4	4	4	4	2
	255.40	816.40	665.10	017.20	742.40
3. Perindustrian	11	15	13	11	16
	769.90	858.80	019.30	763.10	687.60
4. Listrik, Gas, dan Air	1	2	1	3	2
	514.60	221.80	248.80	028.90	139.60

5. Konstruksi	239.60	526.80	1 383.60	954.50	186.90
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, dan Hotel :	1	1	1	1	1
Perdagangan	251.80	069.00	379.80	275.30	558.20
Restoran dan Hotel	483.60	606.50	866.80	625.10	670.40
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	768.80	462.50	513.10	650.20	887.80
8. Real Estate dan Jasa Perusahaan	2	1	3	3	
9. Jasa Masyarakat, Sosial, dan Perorangan	808.20	449.90	000.80	289.90	750.20
Jumlah	401.80	677.70	1 168.40	2 433.60	2 321.50
	645.80	341.70	337.50	294.30	818.20
	24	28	28	29	28
	564.70	617.50	529.60	275.90	964.10

Sumber : BPS

**Tabel I.3**

**Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi 1) (miliar rupiah), 2012-2016 berdasarkan range dari data BPS di MS Excel**

Sektor Ekonomi	Invesment				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan :	9		13	13	21
	888.1	6 953.4	379.9	112.8	671.0
Pertanian	9		13	12	21
	728.9	6 949.2	357.9	366.4	464.6
Kehutanan	144.5	0.1	0.3	471.8	203.8
Perikanan	14.7	4.1	21.7	274.6	2.6
2. Pertambangan dan Penggalan	10	18			
	480.9	762.2	3 140.7	3 946.8	6 033.6
3. Perindustrian	49	51	59	89	106
	889.1	171.1	034.7	045.3	783.7
4. Listrik, Gas, dan Air	3	25	36	21	22
	796.8	831.3	296.8	946.8	794.5
5. Konstruksi	4		12	17	14
	586.6	6 033.2	097.7	165.4	039.1
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, dan Hotel :	2				
	045.4	3 606.7	2 249.3	5 403.9	6 073.3

Perdagangan	1	030.4	2 204.9	518.5	1 426.6	4 513.4
Restoran dan Hotel	1	015.0	1 401.8	1 730.8	3 977.3	1 559.9
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	8	612.0	13	15	21	26
8. Real Estate dan Jasa Perusahaan	13	58.0	178.4	715.0	333.9	769.6
9. Jasa Masyarakat, Sosial, dan Perorangan	2	825.1	462.0	1 100.4	1 000.9	2 873.2
Jumlah	92	182.0	128	156	179	216
			150.6	126.3	465.9	230.8

Sumber : BPS

Investasi dari dalam negeri maupun investasi dari luar negeri dapat menunjang peningkatan modal usaha dalam sektor ekonomi. Tak hanya cukup dengan investasi saja, pengentasan pengangguran juga dapat dilakukan melalui sektor ekonomi kreatif yang dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Moorthy dkk. dalam penelitiannya terhadap 7443 UMKM di Malaysia menyatakan bahwa variabel effective entrepreneurship, manajemen sumber daya manusia, informasi pemasaran dan aplikasi teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Perlu dicatat bahwa pengelola UMKM yang berusia 26–35 tahun sejumlah 17,7% sedangkan usia 36–45 tahun sejumlah 40,7% dan sejumlah 40,2% berumur di atas 46 tahun. Jenjang pendidikan Diploma

sebanyak 44,5%, dan Strata 1 sebanyak 50,7%, Suatu tugas bagi Indonesia dalam keseriusan menangani UMKM.

Data terakhir menunjukkan tahun 2012 di Indonesia, kebanyakan dari sektor ekonomi kreatif ini adalah para pengusaha kecil mikro menengah (UMKM) yang berpendidikan dibawah S1. Menyadari akan permasalahan tersebut di atas, maka fokus pemberdayaan UMKM mestinya pada penguatan kapasitas atau kualitas Sumber Daya Manusianya. Apalagi, menurut BPS (1998) pada waktu itu, jadi 16 tahun yang lampau, bahwa sebagian besar atau 97,4% usaha kecil di Indonesia berpendidikan jenjang SLP ke bawah. Tingkat pendidikan yang rendah ini bisa mempengaruhi semangat jiwa kewirausahaannya (entrepreneurship spirit).<sup>4</sup>

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia seyogyanya sudah dilaksanakan secara konkrit dan serius dalam waktu 10–20 tahun yang lampau. Suatu refleksi yaitu apakah tahun 2015, dimulainya Komunitas Ekonomi ASEAN dapat menghantarkan UMKM menjadi harapan di masa depan, paling tidak dapat dilihat dari beberapa aspek seperti berikut ini:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

---

<sup>4</sup> *Ibid P.5*



5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor<sup>5</sup>.

UMKM mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia dengan asumsi dukungan perkembangan wirausaha sebanyak 6,67 juta dalam lima tahun, maka dari prediksi tersebut nampaknya usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru. Jika pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten, maka sasaran pengangguran bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan. Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.<sup>6</sup>

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menjelaskan, salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi yang rendah adalah ekonomi nasional belum bersandar pada industri manufaktur yang berdaya serap tenaga kerjanya tinggi. “Kontribusi industri pada perekonomian justru sedang turun “Bima”.

Ia mencatat kemerosotan kontribusi industri pada perekonomian (deindustrialisasi) sudah terjadi selama 10 tahun terakhir. Dari 26 persen, kontribusi industri manufaktur pada produk domestik bruto (PDB) menjadi hanya 20 persen. Jika deindustrialisasi ini dibiarkan, serapan tenaga kerja secara nasional bisa kurang optimal. Karenanya, pemerintah perlu memberi insentif pada industri penyerap tenaga kerja.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Bunaiya Fauzi Arubone Selasa, 26 Juni 2018

Dalam data yang disertakan Bhima, contoh kemerosotan industri bisa dilihat di Batam, daerah yang dirancang menjadi salah satu pusat industri. Setiap tahun, paling sedikit satu pabrik berhenti beroperasi di berbagai kawasan industri. Di luar kawasan industri, kemerosotan terlihat pada sektor galangan kapal. Dari 110 galangan dengan 250.000 tenaga kerja pada 2014, kini hanya lima galangan aktif dengan total pekerja tidak sampai 22.000 orang.

Kemerosotan juga terlihat nyata pada industri rokok. Dalam periode 2006-2016, 3195 pabrik rokok tutup dan sedikitnya 32.729 pekerja pabrik rokok dipecat. Hampir seluruh pekerja yang dipecat merupakan pelinting atau pekerja sigaret kretek tangan (SKT). Buruh pelinting adalah orang-orang berketerampilan rendah yang tidak bisa mudah mengganti pekerjaan.<sup>8</sup>

Indonesia belum siap mengikuti pemberlakuan upah standar ASEAN. Pemberlakuan ini harus mempertimbangkan kondisi para pelaku usaha dan industri di Indonesia. Selain itu, Indonesia seharusnya fokus membenahi Upah Minimum Regional (UMR) yang masih menjadi salah satu masalah utama ketenagakerjaan di Tanah Air. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, inisiatif Indonesia untuk mengusulkan adanya upah minimum di ASEAN sangat bagus. Namun hal ini harus diikuti adanya pembenahan internal terkait pengupahan di dalam negeri. Standarisasi upah pekerja ASEAN akan sangat berdampak pada industri dan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dikhawatirkan

---

<sup>8</sup> Ibid

hal ini akan mengganggu iklim ekonomi yang kondusif dan membebani ongkos produksi perusahaan.<sup>9</sup>

Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit SPSI Kabupaten Karawang mengklarifikasi kabar PHK 2.000 buruh pabrik sepatu awal Juli 2018 lalu. Menurut Ketua FSP TSK-SPSI Karawang Dion Untung Wijaya, PHK tersebut benar adanya. Namun bukan karena kenaikan upah akibat penetapan UMK Karawang. Dalam rilis yang PR terima di Bandung, Senin 9 Juli 2018, pengurangan [jumlah buruh pabrik sepatu](#) PT Dean Shoes ialah 1.900 orang. “Pengurangan pekerja tersebut karena berkurangnya jumlah order produksi dan mengakibatkan tidak seimbangnya rasio jumlah produksi dan pekerja,” kata Dion.

Dion menyatakan, tidak pernah ada upaya penangguhan pelaksanaan UMK yang dilakukan PT Dean Shoes. Malah, pihak pabrik telah melakukan pertemuan bipartit dengan para pekerja dan didampingi PUK SP TSK-SPSI PT Dean Shoes. “Manajemen sudah melakukan negosiasi dengan buyer baru. Jika sukses, maka akan dilakukan rekrutmen pekerja lagi,” ujar dia. Banyak perusahaan pindah, Informasi ketidakmampuan pengusaha bayar upah sesuai UMK Karawang datang dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat Ahmad Suroto. Jumat, 6 Juli 2018, ia menyatakan hingga akhir Mei 2018 sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya.

Akumulasinya, jumlah buruh yang terkena PHK di 2018 sudah mencapai 11.000 orang. Sementara pada 2017 ada 29.000 buruh yang di-PHK. Suroto

---

<sup>9</sup> Beritajowo.Com

menduga PHK massal itu terjadi akibat perusahaan terlalu berat untuk membayar [upah buruh Karawang](#) yang memang termahal di Indonesia. "Selain mengurangi jumlah karyawan, banyak perusahaan padat karya di Karawang yang memilih pindah ke daerah lain yang UMK-nya jauh lebih rendah," ujarnya. Disebutkan, daerah tujuan pindah yang banyak diincar perusahaan padat karya adalah Majalengka, Subang, Cirebon, Garut, Kendal, dan Karanganyar Jawa Tengah.

Hal senada disampaikan Ketua Apindo Karawang, H. Abdul Syukur. Menurut dia, PHK massal merupakan efek nyata dari kenaikan UMK yang terlalu tinggi. "Kesenjangan UMK Karawang dengan daerah lain terlalu tinggi. UMK Subang hanya berada pada angka Rp 1,8 juta, sedangkan UMK Karawang saat ini Rp 3,9 juta. Hal ini yang mendorong perusahaan di Karawang berbondong pindah ke daerah lain," katanya. Menurut Abdul Syukur, kenaikan UMK Karawang yang terlalu tinggi terjadi sejak 2013. Saat itu UMK Karawang naik 58% dan berlanjut hingga saat ini. Sejak saat itu pula banyak perusahaan yang anjang-jancang memindahkan pabriknya ke daerah lain. Dan akhirnya rencana pemindahan pabrik banyak direalisasikan pada tahun 2017 hingga sekarang.<sup>10</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah masalah yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Sedang dan Besar sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> [Gita Pratiwi](#) 9 July, 2018 - 15:23

1. Rendahnya jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia
2. Rendahnya tingkat upah industri sedang dan besar.
3. Kurangnya jumlah unit usaha industri sedang dan besar di Indonesia.
4. Kurangnya peran modal usaha dalam membuka industri sedang dan besar di Indonesia.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja memiliki peran penting di Indonesia yang didukung oleh beberapa faktor yang kompleks. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah pada “Pengaruh Produk Domestik Bruto(PDB) industri, Tingkat Upah, Jumlah Unit Usaha, dan Modal Usaha Modal Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Sedang dan Besar di Indonesia.”

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh produk domestik bruto sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri sedang dan besar di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh upah riil terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri sedang dan besar di Indonesia ?
3. Apakah terdapat pengaruh suku bunga riil terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri sedang dan besar di Indonesia ?

4. Apakah terdapat pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industr sedang dan besar di Indonesia ?
5. Apakah terdapat pengaruh modal usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri sedang dan besar di Indonesia ?
6. Apakah terdapat pengaruh pdb industri, tingkat upah, jumlah unit usaha, dan modal usaha terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri sedang besar di Indonesia ?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh pdb industri, tingkat upah, jumlah unit usaha, dan modal usaha terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri sedang besar di Indonesia.
2. Bagi mahasiswa dapat digunakan untuk referensi ilmiah dan dapat membuka lapangan kerja untuk menambah jumlah penyerapan tenaga kerja.
3. Bagi masyarakat dapat menambah wawasan akan pentingnya jumlah penyerapan tenaga kerja